

Analisis Kebijakan BLT Dan Desa dalam Upaya Penanganan Covid-19 pada Sektor Desa.

¹kasih Putri Nirwana, ²Sakir, ³ Arissy Jorgi Sutan

^{1&2} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

³ Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Dikirimkan: 10 Juli 2022

Direvisi: 25 September 2022

Diterbitkan: 30 September 2022

INTISARI

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan desa dalam upaya penanganan covid-19 pada sektor desa. Peran dan kebijakan pemerintah dalam perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Pandemi tidak hanya dapat mengancam masyarakat, tetapi juga dapat menagncam situasi ekonomi di berbagai sektor. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis keadaan yang sedang terjadi. Penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang ketat. Agar peneliti dapat melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai masalah yang dibahas maka digunakan pendekatan kuantitatif. analisis ekonomi publik di atas melalui peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi regulasi, administrasi maupun implementasi yang ada di lapangan. Peran subordinat pemerintah dalam perekonomian selama pandemi ini menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakannya.

KATA KUNCI

Pandemi, Covid 19, Kebijakan Pemerintah Indonesia, Ekonomi.

Pendahuluan

Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, saat ini sedang menghadapi tantangan bersama untuk memerangi virus yang dikenal sebagai Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat. Menurut laporan Worldometer, Indonesia berada di peringkat ke-32 di antara berbagai negara yang terkena virus Covid-19, dibandingkan Amerika Serikat yang berada di peringkat 1 peningkatan kasus terbanyak (Worldometers, 2022). Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan terkait penanggulangan bencana dan tindakan cepat, tepat,

Korespodensi:

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 .

Email: arissy.jorgi.psc20@mail.umy.ac.id

efektif dan efisien bagi pengungsi. Fungsi lain BNPB yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Berdasarkan data BNPB, dilaporkan jumlah orang yang positif terinfeksi virus Covid-19 terus bertambah setiap harinya, seperti terlihat pada Gambar 1. Sejak merebaknya virus ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh WHO, menerapkan berbagai fasilitas medis untuk pasien terinfeksi virus corona, menerapkan pedoman jarak sosial, dll. Saya telah mengambil langkah-langkah tersebut. Di Indonesia, terutama di daerah yang rentan virus corona, pembatasan sosial besar (PSBB) telah berubah dalam beberapa kasus. Munculnya pandemi virus corona di Indonesia telah mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, terutama sektor ekonomi. Hampir setiap negara di dunia terkena wabah epidemi ini, yang menyebabkan gejolak ekonomi. Berdasarkan penelitian (Yendra & Wetsi, 2021) wabah pandemi corona yang telah menyebar ini, pada akhirnya membawa konsekuensi yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya jika ditinjau dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.

(Sofi, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona “ tidak melampirkan kerangka teori yang dapat membantu pembaca dalam menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Peran Pemerintah. Penelitian ini menggunakan Teori peran pemerintah Menurut Musgrave, peran pemerintah adalah peran distribusi, peran distribusi, dan peran stabilisasi (Engka et al., 2021; Sofi, 2021; Sumarni, 2020). Peran alokasi adalah untuk memastikan alokasi sumber daya ekonomi yang efisien, karena sistem pasar tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Peran distribusi sebagai sarana mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dengan menyeimbangkan efisiensi dan pemerataan alokasi sumber daya melalui penggunaan sarana keuangan, jaminan sosial dan pelayanan publik yang mempengaruhi distribusi pendapatan (ACEN et al., 2022; Mufida et al., 2020).. Padahal peran stabilisasi adalah menciptakan stabilitas ekonomi bagi negara. Selain ketiga peran yang diidentifikasi Musgrave, intervensi pemerintah juga diperlukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan istilah Stimulating Role. Salah satu peran distribusi pemerintah dalam instrumen perpajakan menjadi penting karena pajak merupakan modal dasar pembangunan. Misalnya untuk mendanai penyediaan barang dan jasa publik, mengatur perekonomian, dan mengatur konsumsi masyarakat.

Menurut Tjokromidjojo juga dapat dilihat dalam tiga hal:

1. Pada awalnya, peran pemerintah adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam pembangunan. Bahkan, fungsi pemungutan pajak seringkali tidak terfokus pada kepentingan rakyat. Ini adalah peran pemerintah yang paling tradisional.
2. Selanjutnya lahir konsep PNS. Peran pemerintah merupakan peran pelayan sosial yang perlu ditempatkan di masyarakat. Hal ini juga ditopang oleh banyak gagasan tentang welfare state atau negara kesejahteraan.
3. Namun, ada juga cara untuk menjalankan peran pemerintah, yaitu memberikan peran pengusaha atau promotor reformasi dan inisiatif pembangunan pemerintah daerah kepada pemerintah. Pemerintah adalah “agen pembangunan” atau motor penggerak pembaruan/pembangunan.

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pandemi penyakit coronavirus 2019 (Covid19) terhadap Indonesia, kelipatan sektor dan kondisi perekonomian. Metode Survei Terapan Survei Kualitatif yaitu dalam bentuk deskripsi dan deskripsi literatur, dan pengukuran terkait pandemi Covid-19 dari sumber berbeda dalam penelitian ini. Teknik perpustakaan (Studi Perpustakaan yaitu Studi yang dilakukan oleh Studi Sastra (Perpustakaan) dalam bentuk buku, memo, jurnal, web (Internet), dan Informasi Lain Terkait Topik ini Survei Ini Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder di berupa catatan, dokumen, jurnal, buku, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berusaha Menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan BLT-Dana Desa, dalam rangka pengatasan pandemic Covid-19 di lingkup Desa?
2. Bagaimana dampak adanya kebijakan BLT Dana Desa dalam rangka pengatasan pandemic Covid-19 di lingkup Desa?

Metode

Penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang ketat. Agar peneliti dapat melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai masalah yang dibahas maka digunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki kriteria sebagai berikut: Analisis data merupakan hal utama dalam pendekatan sumber data langsung dan penelitian (Rijali, 2019; Sarosa, 2021). Selain itu, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan merencanakan. Eksplorasi lagi ditandai oleh Koeantjaraningrat sebagai penelitian dengan fokus kuat menjelajah. Eksplorasi dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang tampaknya berlangsung lebih lama. Tujuan deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang atau baru saja mulai ada. Strategi penelitian saat ini adalah mempelajari kasus. Tujuan dari studi kasus adalah untuk menyelidiki sistem bermasalah atau kasus yang terjadi selama periode waktu yang lama dengan menggunakan data yang akurat dan dapat diandalkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya (Butsi, 2019; Fadli, 2021).

Dengan menggunakan metodologi deskriptif dengan fokus kualitatif, penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam Rekonstruksi Pasca Ekonomi Pandemi Covid-19. Pendekatan yang dilakukan melalui terlibat dalam percakapan dengan responden. Metode pengumpulan data menggunakan pertimbangan dan pengamatan yang cermat terhadap informasi yang sudah diposting. Cara yang dianjurkan bagi pengguna untuk memperoleh data sebagai berikut: Mengirimkan surat izin KKN dari kampus sebagai formalitas penelitian; 2) Wawancara; 3) Observasi; 4) Dokumentasi; 5) Sumber internet resmi seperti berita atau jurnal; 6) Analisis data; 7) Triangulasi data untuk menghitung data kredit. Pendekatan peneliti yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan tidak cacat dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sebagian besar sumber mulai dari perangkat desa, ketua Anshor, pedagang yang terakhir masyarakat. Mengajukan Surat Izin Wawancara Lebih Jauh di Balai Desa Lowayu Sebelum Wawancara dan Observasi Peneliti.

Setelah diberi tahu, peneliti terlebih dahulu memulai wawancara dan observasi. Setelah diberi tahu, peneliti terlebih dahulu memulai wawancara dan

observasi. Sedangkan untuk menjelaskan tujuan dan maksud peneliti wawancara dengan mereka untuk wawancara terlebih dahulu dengan masyarakat dan pedagang terlebih dahulu secara pribadi. Hal ini diperlukan untuk menganalisis dan triangulasi data untuk melihat apakah itu telah rusak. Agar data yang diperoleh dari narasumber valid dan tidak cacat oleh karena itu. Subyek skripsi ini adalah perangkat-perangkat desa yang memiliki keunggulan kompetitif dalam memberikan informasi. Akan tetapi, Ketua Anshor, pedagang, dan masyarakat umum menerima nasihat. Peneliti menggunakan ringkasan tersebut di atas untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan akurat.

Menurut Miles dan Huberman (1994), tiga jenis utama analisis data kuantitatif adalah redaksi data, penyajian data, dan analisis kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemulihan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tidak terorganisir, sehingga menimbulkan kemungkinan seseorang mencoba membuat kesimpulan (Sari et al., 2022). Data yang dapat diperoleh secara andal dan diverifikasi keakuratannya dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar batas-batas data aslinya, baik untuk tujuan validasi data maupun sebagai acuan yang merendahkan data tersebut, diperoleh dengan menggunakan metode triangulasi. Untuk melakukan analisis kualitatif, peneliti harus berusaha untuk mendapatkan data yang valid untuk penelitian ini untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak valid (cacat).

Pembahasan (*subbab pembahasan langsung ditulis frase temuannya*)

A. Pelaksanaan Kebijakan BLT-Dana Desa dalam rangka pengatasan pandemic Covid-19

Masih rendahnya sentimen investor pada pasar yang ada membuat pasar berfluktuasi ke arah yang cenderung negatif. Tahap-tahap yang strategis terkait kebijakan fiskal dan moneter inilah yang sangat dibutuhkan pada saat ini untuk memberikan dorongan dalam perekonomian. Selain itu, lambatnya perekonomian global khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke China juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis sensitivitas, hal-hal tersebut menjelaskan bahwa melambatnya Salah satu tindakan pemerintah terkait langkah-langkah keuangan di masa pandemi Indonesia adalah dengan memberikan stimulus sebagai bentuk respon pemerintah terhadap pelaku ekonomi yang terdampak pandemi. (ACEN et al., 2022; Reptiana et al., 2021) menyatakan bahwa kebijakan menjaga jarak sosial dan fisik di masa pandemi ini menimbulkan hambatan dalam rantai nilai dunia usaha dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia yaitu mengguncang sektor ekonomi. studinya dengan memberi. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan guncangan tersebut adalah stimulus ekonomi berupa stimulus fiskal.

Namun kenyataannya, insentif pajak yang ditawarkan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri pariwisata di masa pandemi corona ini. Ini akan memberi peneliti bagaimana pandemi COVID-19 berdampak negatif pada kebutuhan kawasan pariwisata, manfaat insentif pajak di kawasan pariwisata, dan masalah ekonomi yang dihadapi industri pariwisata. Anda dapat lebih akurat mengidentifikasi solusi alternatif untuk insentif pajak yang dapat ditangani secara efektif Karena pandemi korona. Temuan

menunjukkan bahwa ada dua kebutuhan yang belum terpenuhi di sektor pariwisata, terutama dalam insentif pajak pemerintah, berupa insentif pemerintah untuk memfasilitasi akses permintaan, konsumsi dan kredit usaha (Hafni et al., 2021; Nafiah & Bharata, 2021) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal atau moneter yang diterapkan pemerintah dapat mengubah keadaan masyarakat untuk memenuhi distribusi pendapatan yang diharapkan oleh warga. Salah satu strateginya adalah mengubah distribusi pendapatan secara langsung dan tidak langsung. Distribusi pendapatan langsung dapat dilakukan oleh negara melalui pajak progresif dan subsidi kepada kelompok masyarakat miskin.

Perubahan tidak langsung dalam distribusi pendapatan antara lain pengeluaran pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti penyediaan perumahan bagi kelompok masyarakat tertentu, pemberian subsidi kepada petani dengan pupuk, dan pemberian subsidi kepada pekerja non industri dengan bahan bakar. Pemerintah dapat melakukannya melalui kebijakan. (Iping, 2020; Reptiana et al., 2021), keberhasilan kebijakan pemerintah diukur dari reaksi publik terhadap kebijakan tersebut. Terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, kebijakan dalam negeri yang rasional akan dapat diterima secara wajar oleh warga jika pemerintah mengembangkan kebijakan yang dapat menjamin ketersediaan sumber energi ekonomi bagi warga (Mufida et al., 2020).

B.Dampak Kebijakan BLT Dana Desa Rangka Pengatasan Pandemi Covid 19 Di Lingkup Desa

Selain berimplikasi pada Kesehatan Covid 19 menimbulkan dampak lintas wilayah, memberi kegiatan ekonomi dan sosial di daerah, serta menegakkan kegiatan ekonomi dan pendapatan daerah dana Desa. OECD Quarterly National Database (2020) melaporkan bahwa G20 di setidaknya 10 negara mengalami penurunan lebih dari 10% pada kuartal kedua tahun 2020. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia terhadap pandemi COVID-19 jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara anggota G20 lainnya, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun 5,3% pada kuartal kedua, atau Korea Selatan dan China 2 Hanya satu negara yang menyatakan kalah. Namun, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 masih positif sebesar 2,97% year-on-year (Mufida et al., 2020).

C.Peran Stabilisasi

Menurut Grave menyatakan bahwa negara ini memiliki tiga peran penting dalam perekonomian, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Dalam peran stabilisasi ini, pemerintah diharapkan mampu menjaga perekonomian mereka tetap bekerja penuh atau pada tingkat harga komoditas yang stabil. Selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dari bulan Maret hingga Juli, peran stabilisasi pemerintah adalah untuk lebih menstabilkan harga sembako di berbagai wilayah di Indonesia. Segala upaya akan dilakukan oleh pemerintah tengah situasi penyebaran virus Covid 19 ini, harga-harga bahan pokok tetap terjangkau di masyarakat baik dari sisi stock, selalu tersedianya pasokan, distribusi, sampai menjangkau tingkat harga yang stabil. Dilihat dari sisi stock saja, dalam satu minggu sekali pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan pejabat terkait dengan pembahasan monitoring/evaluasi seluruh bahan pokok. Sedangkan dilihat dari sedianya pasokan, pemerintah melibatkan beberapa pengusaha dari

beberapa sektor terutama yang bergerak di sektor riil untuk menjamin pasokan bahan baku pangan agar selalu tersedia (Nurahmawati & Hartini, 2020).

Pentingnya menjaga protokol kesehatan menurut kebijakan WHO yaitu selalu menggunakan masker serta sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand-sanitizer saat pandemi Covid 19 mulai masuk ke Indonesia sekitar awal Bulan Maret 2020 pada akhirnya membuat masyarakat berbondong-bondong membeli masker dan sabun pencuci tangan atau hand-sanitizer. Anjuran WHO ini membuat beberapa masyarakat melakukan Panic Buying untuk masker dan hand-sanitizer sehingga barang-barang tersebut mulai langka dipasar karena diborong oleh pembeli dan spekulan. Bahkan tidak hanya masker dan sabun cuci tangan atau hand-sanitizer saja, para pembeli juga ramai-ramai men-stock kebutuhan pokok di pasar sehingga harga bahan pokok menjadi tidak terkendali di pasar dan terjadi kelangkaan di pasar akibat panic buying ini. Upaya dari para pembeli ini diakibatkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak perlu memborong semua bahan pokok, masker, dan lain-lain agar stock atau ketersediaan barang dan harga-harga kembali menjadi stabil di pasar. Sedangkan dilihat dari peran pemerintah dalam mengatasi penganguran selama masa pandemi ini dimulai dari kebijakan relokasi biaya atau anggaran sampai pada beberapa perubahan-perubahan kebijakan agar usaha tetap berlangsung serta perlindungan bagi para tenaga kerja tetap dapat dikendalikan. Menaker Ida Fauziah menyatakan terdapat tiga strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan tingkat pengangguran yang tinggi dalam masa pandemi Covid-19 yaitu:

1. Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan program Balai Latihan (BLK) tanggap pandemi Covid-19, dimana dalam program ini peserta yang ada tidak hanya mendapatkan keterampilan yang mumpuni tetapi juga mendapatkan insentif setelah masa pelatihan selesai.
2. Program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi, seperti program padat karya dan kewirausahaan.
3. Pembukaan layanan konsultasi, informasi serta pengaduan bagi para tenaga kerja atau buruh terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

D.Peran Alokasi

Keseluruhan strategi ini tentunya saling berkaitan pada enam aspek dalam pemulihan ekonomi nasional sebagaimana yang diproklamirkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Contohnya saja dengan pemberian stimulus ekonomi bagi para pengusaha ataupun UMKM agar mampu “berdiri” di masa pandemi ini sehingga diharapkan agar tetap dapat menunaikan pembayaran gaji pegawainya. Selain itu pemerintah juga (Worldometers, 2022) memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah serta pemberian bunga kredit yang ringan bagi para tenaga kerja di sektor formal serta program jaring pengaman sosial untuk membantu setiap tenaga kerja formal ataupun informal serta dengan memberikan prioritas utama dengan adanya kartu prakerja bagi korban pemutusan hubungan kerja dan bagi pekerja yang terpaksa harus dirumahkan. Tentunya dengan kebijakan pemerintah ini diharapkan

dapat menjadi solusi bagi para pekerja yang terkena dampak pandemi ataupun mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam data Badan Pusat Statistik (2020), diketahui total pengangguran di Indonesia pada bulan Februari tahun 2020 lalu adalah sebanyak 6,88 juta orang. Data terakhir pada Juli 2020, tingkat pengangguran di Indonesia naik tajam hingga lebih dari 10 juta orang. Jumlah ini terus naik sejak pandemi ini melanda Indonesia pada Maret lalu. Artinya, angka pengangguran bertambah sekitar 3,7 orang akibat pandemi Covid-19 sejak Februari 2020. Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi di Indonesia sampai saat ini belum dapat mengatasi pengangguran di Indonesia. Dengan munculnya pandemi Covid-19 ini tentunya setiap negara dengan tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang masih rendah masih “tertatih” untuk mengatasi berbagai persoalan kesejahteraan penduduk khususnya masalah pengangguran (Muga et al., 2021; Pramanik, 2020).

Berdasarkan teori Musgrave (1984) dan fakta data yang ada tentang peran pemerintah untuk menciptakan kondisi dimana kesempatan kerja penuh atau full employment dengan tingkat harga barang yang stabil serta kebijakan yang dilakukan dalam perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini masih dirasa sulit untuk dilakukan pada saat wabah pandemi masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 dibuktikan meningkatkannya angka pengangguran dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Adapun upaya-upaya pemerintah dalam mengaloaksikan sumber-sumber daya yang ada dalam perekonomian pada peran alokasi dapat dilakukan secara langsung berupa belanja barang untuk keperluan pertahanan dan pendidikan atau secara tidak langsung baik melalui pajak dan subsidi guna mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Peran alokasi ini tentunya sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang publik agar tidak terjadi kegagalan pasar karena di dalam sistem perekonomian suatu negara tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan diserahkan melalui mekanisme pasar (Maun, 2020).

Peningkatan belanja pemerintah ini dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan peran pemerintah sebagai upaya untuk mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Dengan semakin besarnya belanja pemerintah maka kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi penyediaannya oleh sektor swasta dapat dinikmati melalui penyediaannya oleh pemerintah. Namun, kecenderungan peningkatan belanja pemerintah ini tidak serta merta berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat.

Apabila alokasi belanja pemerintah tidak tepat sasaran pada kegiatan ekonomi masyarakat, maka tidak akan terjadi efek multiplier yang positif dalam perekonomian. Persoalan belanja pemerintah yang juga rentan dengan pemborosan dan inefisiensi membuat pemerintah harus mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya di berbagai wilayah agar pembangunan wilayah bisa berjalan melalui perencanaan anggaran yang tepat guna. Pengalokasian belanja pemerintah yang tidak memiliki perencanaan dan tidak dapat dikendalikan dengan baik akan menjadi sumber

pemborosan anggaran negara sehingga berefek merugikan masyarakat (Rahmaniah, 2021).

Adapun peran pemerintah secara langsung dalam alokasi sumber daya selama pandemi Covid-19 adalah realokasi anggaran dengan merealokasi kegiatan-kegiatan belanja barang yang tidak terlalu prioritas seperti perjalanan dinas, honorarium, biaya rapat, pengadaan event serta perbelanjaan operasional. Dari data Kementerian Keuangan tahun 2020, secara umum dalam realisasi belanja pemerintah pusat penurunan yang paling signifikan ditunjukkan pada realisasi belanja barang dan subsidi dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.

Peran pemerintah pusat dalam alokasi selama pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020 terjadi penurunan realisasi belanja barang sebesar 6,62% untuk belanja perjalanan ataupun belanja barang operasional atau non operasional karena dampak pandemi yang semakin meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah DKI Jakarta, sehingga hal ini mempunyai dampak pada tertundanya kegiatan bagi beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan belanja barang oleh kementerian atau lembaga. Maka dari itu sebagai upaya untuk menangani dampak pandemi ini, pemerintah juga melakukan realokasi kegiatan dan anggaran pada kementerian atau lembaga dalam rangka mempercepat penanganan laju pertumbuhan Covid-19.

Sementara itu, jika dilihat kembali data per Bulan April sampai Mei, realisasi belanja negara tumbuh negatif sebesar 18,79 % (yoy) dan 30,11 % (yoy). Semakin meluasnya pandemi Covid-19 masih menjadi penyebab sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Selain hal tersebut, penerapan kebijakan dari pemerintah dengan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tentu saja sangat berdampak pada pelaksanaan tugas perkantoran. Penerapan sistem Work From Home (WFH) juga sangat berpengaruh yang sejalan dengan penurunan pelaksanaan berbagai program atau kegiatan pada kementerian ataupun lembaga selama kebijakan pemerintah seperti PSBB yang wajib dijalankan.

Turunnya realisasi belanja barang pada Bulan Juni-Juli 2020 masing-masing sebesar 16,8% dan 9,3% disebabkan oleh efisiensi belanja barang yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan pandemi. Pada periode tersebut pemerintah juga telah mulai mempersiapkan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang cepat dan tepat dalam mengatasi pandemi dan diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi para pelaku usaha terutama yang bergerak pada sektor industri yang memiliki banyak tenaga kerja atau padat karya.

Berdasarkan teori Musgrave (1984) dan fakta data mengenai peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam masa pandemi Covid-19, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah ini menjadi salah satu kunci awal respon pemerintah terhadap upaya yang harus dilakukan instansi pemerintah untuk mengatasi permasalahan masa pandemi ini. Dengan beberapa kebijakan yang cukup detail yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti mengurangi belanja barang untuk kementerian atau lembaga untuk kemudian dialihkan untuk menambah belanja terutama dalam bidang kesehatan, serta perlindungan sosial dalam rangka penyediaan barang publik untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun, realokasi belanja pemerintah khususnya pemotongan belanja barang yang dialihkan pada penanganan Covid-19, juga harus melibatkan lembaga-lembaga pengawas keuangan terutama

kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

E.Peran Distribusi

Secara teoritis, peran pemerintah ini dilaksanakan agar pendapatan dalam perekonomian dapat didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat dalam suatu perekonomian baik melalui instrumen pajak ataupun dengan subsidi dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah pemerataan dan efisiensi. Adapun data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan (2020) per Januari tahun 2020 ini adalah sebesar Rp601,91 T setara dengan 50,21 % dari target penerimaan pajak tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.198,82 T. Pada periode ini penerimaan pajak mengalami kontraksi yang disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang melambat selama masa pandemi Covid-19 dan juga kegiatan untuk ekspor-impor seiring melemahnya kegiatan ekonomi dalam hal perdagangan internasional. Badan Pusat Statistik merilis data perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 menghadapi kontraksi sebesar 5,32 %. Disamping itu, insentif fiskal yang dibentuk yang menyangkut dalam hal fasilitas perpajakan yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga mengalami penekanan tambahan dalam kinerja penerimaan pajaknya. Tekanan tersebut, sangat berdampak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan pada pajak-pajak atas impor dimana terjadi perlambatan profitabilitas usaha pada tahun lalu, pemberian insentif perpajakan dengan penurunan tarif PPh Badan dari 25 % menjadi 22 %, serta adanya pengurangan dalam hal angsuran bulanan pada PPh Pasal 25 sebesar 30%. Sedangkan penurunan pada pajak atas impor disebabkan oleh perlambatan aktivitas impor, adanya insentif pembebasan PPh Pasal 22 tentang impor, dan penjualan kendaraan bermotor yang menurun (Kementerian Keuangan, 2020).

Sesuai dengan fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) yang menyatakan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai anggaran yaitu sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran- pengeluarannya. Fungsi mengatur dalam perpajakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan adanya fungsi pajak sebagai anggaran dan pengatur (regulation) diharapkan penerimaan pajak di suatu negara akan mengalami peningkatan setiap tahunnya demi peningkatan pemerataan pembangunan (Arumdani et al., 2021).

Dari potret penerimaan pajak yang mengalami penurunan sejak masuknya pandemi Covid-19, dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang terbesar untuk membiayai program-program pembangunan nasional. Maka dari itu, diperlukan strategi kebijakan untuk kembali memulihkan perekonomian nasional khususnya dalam penerimaan pajak pasca pandemi yang sampai saat ini pun belum diketahui kapan pandemi akan berakhir. Hal ini sejalan dengan penelitian (Cheisviyanny, 2020) mengenai strategi dalam memulihkan penerimaan pajak pasca Pandemi Covid-19 berupa saran yang diusulkan yaitu: (1) Optimalisasi mekanisme withholding tax, (2) Pengenaan PPh final untuk wajib

pajak non UMKM, dan (3) Efisiensi biaya pemungutan pajak. Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa peran distribusi pemerintah dalam belanja subsidi yang ditunjukkan dengan realisasi pada subsidi sampai bulan Maret 2020 adalah sebesar Rp18,71 triliun dimana tingkat pertumbuhan pertahun nya adalah sebesar - 14,29% pada periode yang sama dimana seluruh nya digunakan untuk subsidi energi.

Realisasi asumsi ICP , nilai tukar serta realisasi subsidi energi juga mempengaruhi realisasi pembayaran subsidi. Realisasi subsidi dari Bulan Maret 2020 sampai saat ini dilakukan untuk membayar tagihan atas JBT minyak tanah, LPG tabung 3 kg, dan untuk tagihan listrik pada bulan Januari-Februari 2020 sebagai bentuk kebijakan pemerintah. Sedangkan data penurunan realisasi subsidi sampai dengan April 2020 yaitu sebesar 13,47 % (yoy) disebabkan oleh proses administrasi dan verifikasi data pada proses dalam tagihan subsidi serta dipengaruhi juga oleh realisasi ICP, CP Aramco dan nilai tukar rupiah yang semakin merosot (Kementerian Keuangan, 2020).

Menutup pertengahan tahun dalam data perekonomian Indonesia, data menunjukkan bahwa terjadi penurunan realisasi pada belanja subsidi pada akhir Juni 2020 sebesar 1,43 % (yoy) yang disebabkan adanya tren penurunan harga minyak dunia. Realisasi Pengeluaran subsidi ini terbagi atas subsidi energi dan subsidi non energi. Termasuk subsidi pajak yang terkena dampak realisasi impuls PPh untuk mengatasi pandemi Covid19. Pada awal semester II tahun 2020 pada Juli 2020, realisasi belanja subsidi juga tercatat mengalami penurunan sebesar 9,3%. Hal ini juga dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak dunia. Respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sebagai peran distribusi di masa pandemi Covid-19 adalah kebijakan fiskal yang relatif progresif. Seperti dilansir situs DDTCNews.com pada April 2020, saat pandemi pertama kali menyerang Indonesia, pemerintah menggunakan alat kontrol untuk mengurangi risiko dampak ekonomi dari merebaknya virus corona-19.

Dengan penerimaan pajak ini, pemerintah ingin menstabilkan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan tingkat produktivitas pada industri tertentu yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah menawarkan beberapa insentif perpajakan, antara lain kebijakan penurunan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22%, kebijakan pengenaan pajak kegiatan e-commerce, dan kebijakan perpanjangan masa pengajuan terkait penyelesaian administrasi perpajakan. Dari sejumlah insentif pajak yang diberikan pemerintah, kebijakan dalam perpajakan dan penggunaan instrumen pajak untuk mendukung penyediaan barang dan jasa publik yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi Covid-19 ini, fungsi pajak dalam praktiknya ini lebih condong kepada fungsi reguler (pengatur) Dari pada fungsi pajak sebagai budgeter (anggaran). Tidak mengherankan lagi apabila target penerimaan pajak dan realisasinya mengalami penurunan dari tahun lalu. Dari data penerimaan pajak saja dapat dilihat bahwa pajak ini benar-benar memainkan peran yang sangat penting dalam, perekonomian baik dari fungsi reguler ataupun budgeter.

Jika ditinjau dalam konteks pemberian insentif dari pemerintah dan berbagai kelonggaran dalam membayar pajak, secara langsung pemerintah telah menggunakan instrumen pajak untuk menstimulus perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah akan berhenti menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan untuk mendanai pembangunan. Namun di sisi lain, keinginan pemerintah untuk mengkaji lebih jauh potensi pajak ini dengan berbagai cara, termasuk perpajakan

e-commerce, sebagaimana tertuang dalam Perpu 1/2020, telah membawa kebijakan ini ke pasar sektor UMKM. dilema. Produk sering datang online saat mereka berkembang. Wabah pandemi. Kebijakan subsidi pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi terkait pandemi seperti kesulitan pelunasan credit line. Perbankan menyambut baik kebijakan ini karena tidak hanya membantu debitur, tetapi juga menghirup angin segar dalam perlambatan arus perbankan. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan subsidi pinjaman hingga 10 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan KPR untuk mendukung penyediaan uang muka KPR bersubsidi. Pernyataan kebijakan pemerintah tentang insentif dan subsidi pajak menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara teoritis disebabkan oleh permintaan agregat yang rendah, yang mengarah pada pendapatan yang lebih rendah. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung penyediaan produk dan jasa terkait.

Gunakan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat bantu lain yang Anda butuhkan untuk menghadapi pandemi. Peraturan ini ada dalam PMK No.28/PMK. Covid-19 Maret 2020 tentang pemberian fasilitas pembebasan pajak atas barang dan jasa yang diperlukan sehubungan dengan penanganan pandemi. Seluruh negara. Untuk itu kebijakan pemerintah ditujukan untuk kepentingan umum yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Salah satu cara tercepat suatu negara dapat meningkatkan permintaan agregat adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Hal ini juga sesuai dengan teori (Musgrave, 1984) yang menekankan peran pemerintah sebagai sarana distribusi pendapatan dan kekayaan melalui keseimbangan antara efisiensi dan keadilan alokasi sumber daya melalui sarana keuangan, jaminan sosial dan penggunaan layanan publik. saya. Distribusi ditampilkan. Peningkatan belanja pemerintah dan pemotongan pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pribadi, mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu dengan peran pemerintah sebagai alat distribusi adalah untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat dengan adil.

Namun masalah keadilan dalam distribusi pendapatan disini masih merupakan masalah yang rumit dalam ruang lingkup ilmu ekonomi sebab masalah keadilan tergantung dari bagaimana pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Dalam masa pandemi Covid-19 ini diharapkan peran pemerintah dalam pendistribusian ini dapat berjalan efektif dan efisien dan memiliki dampak nyata bagi publik yang terkena dampak pandemi Covid-9

Penutup

Dari pemaparan kajian analisis ekonomi publik di atas melalui peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi regulasi, administrasi maupun implementasi yang ada di lapangan. Peran subordinat pemerintah dalam perekonomian selama pandemi ini menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakannya.

Tentu saja kebijakan-kebijakan itu untuk kepentingan publik. Namun mengingat kebijakan yang akrab dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilaksanakan selama ini, bahkan langkah-langkah stimulus fiskal, telah mencapai realisasi dalam penyediaan barang publik, komunitas dan masyarakat. .. Urgensi pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah stimulus negara merupakan langkah preemptive untuk mencegah revisi lebih lanjut terhadap laju pertumbuhan ekonomi negara sehingga tujuan akhir untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis haturkan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan iklim kepenulisan yang memadai baik segi fasilitas maupun kultur dan budaya riset. Terima Kasih pula penulis haturkan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lebih khusus pada Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah menungging iklim riset dari fasilitas serta program pengajaran yang ada. Terima kasih Penulis ucapkan juga kepada Bapak Sakir selaku Dosen Pembimbing Kepenulisan Artikel Ilmiah yang telah memberikan Saran serta Arahan dalam Kepenulisan riset ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- ACEN, A., Ngadino, A., & Arifin, M. Z. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19*. repository.unsri.ac.id.
<https://repository.unsri.ac.id/68301/>
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., & ... (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojujuntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. *Jurnal Indonesia ...*
<http://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/143>
- Butsi, F. I. (2019). Memahami pendekatan positivis, konstruktivis dan kritis dalam metode penelitian komunikasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*.
<https://ejurnal.stikpmedan.ac.id/index.php/JIKQ/article/view/27>
- Engka, M., Umaternate, A. R., & ... (2021). Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Indonesian Journal of ...*
<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/ijsse/article/view/1406>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. In *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. core.ac.uk.
<https://core.ac.uk/download/pdf/440358389.pdf>
- Hafni, R., Sinulingga, N. S., & ... (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat *Prosiding Seminar ...*
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8458>

- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.
<https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/290>
- Maun, C. E. F. (2020). efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa *Jurnal Politico*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702>
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi. *Independen*.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/7348>
- Muga, M. P. L., Kiak, N. T., & Maak, C. S. (2021). Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana–Kota Kupang). In ... *Journal of Economics*, 5 (2), 105. scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/jr6mz35drreezo5lo7yz6b2w7i/access/wayback/http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/download/533/299>
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan ...* <http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/819>
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. *JURMA: Jurnal Program* <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/article/view/733>
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*.
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209>
- Rahmaniah, K. P. (2021). *EFEKTIVITAS BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) SEBAGAI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN* eprints.ipdn.ac.id. <http://eprints.ipdn.ac.id/6299/>
- Reptiana, R. P., Widiatoro, D., Sari, W. D., & ... (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic and* <https://journal.uir.ac.id/index.php/jicop/article/view/8793>
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*.
<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., & ... (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iCZIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA177&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=oodJQuuV_e&sig=egpkResoOWAsror4aOpiy_vMG1U
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YY9LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=gzBd5OW2Of&sig=lpGgujtodzGHnKA3RYbDItKAV_s
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan

Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan*

<https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/280>

Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3358>

Worldometers. (2022). *Coronavirus Cases.*

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Yendra, M., & Wetsi, W. P. M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi.* <http://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JIEE/article/view/409>

Tentang Penulis

Kasih Putri Nirwana adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Penulis melakukan penelitian ini karena memiliki ketertarikan pada topik terhadap kebijakan yang di terapkan Pemerintah Indonesia dalam Menangani covid 19